

TAJUK RENCANA

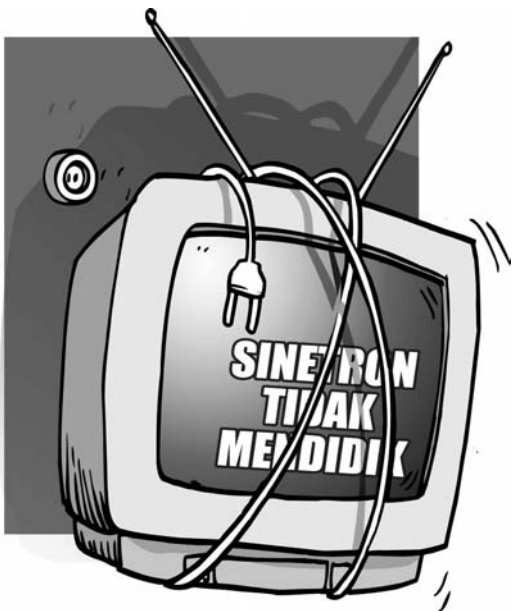
Efektivitas Satgas BLBI

PEMBENTUKAN Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI diharapkan menjadi angin segar dalam penyelesaian kasus yang sudah terkatung-katung hingga 20 tahun itu. Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dibentuk menyusul langkah KPK yang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas pengusutan kasus BLBI. Sesungguhnya kita mempersoalkan mengapa KPK menerbitkan SP3 terkait kasus BLBI yang merugikan negara triliunan rupiah itu. Apalagi ada indikasi kuat para obligor dan debitur BLBI ini tak punya itikad baik melunasi atau menyelesaikan utangnya kepada negara. Untungnya Presiden Jokowi kemudian mengeluarkan Kepres No 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satgas BLBI yang bertugas menagih utang kepada para obligor. Satgas BLBI diberi waktu selama 3 tahun untuk menyelesaikan tugasnya. Akankah Satgas BLBI efektif ? Bagaimana pula seandainya selama waktu 3 tahun ini mereka tetap tak mau melunasi utangnya kepada negara ? Inilah yang harus diantisipasi pemerintah. Artinya, sudah cukup bagi pemerintah untuk memberi keringanan maupun kemudahan kepada para pengempang utang itu. Kita menggunakan istilah pengemplang karena tidak ada tanda-tanda mereka segera melunasi utangnya, padahal telah diberi waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan kewajibannya. Bahkan Menkeu Sri Mulyani sampai mengatakan tidak lagi menanyakan ada tidaknya niat baik para obligor untuk membayar utang atau tidak, karena sudah diberi waktu hingga dua puluh tahun lebih (KR 5/6). Menkeu pun akan terus menagih setidaknya 22 obligor. Sri Mulyani memang tidak mempersoalkan implikasi hukum atas

perilaku obligor yang tidak membayar utangnya, karena pihaknya lebih fokus bagaimana agar uang yang total berjumlah Rp 110, 45 triliun itu kembali ke negara. Meski begitu, hemat kita, harus ada pertanggungjawaban hukum terhadap mereka yang ngemplang utang uang negara. Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa kasus tersebut dapat beralih ke hukum pidana memang masuk akal. Mahfud mengancam memidanakan para obligor yang tidak kooperatif alias tidak mau membayar utangnya. Pada awalnya pemberian dana BLBI kepada para obligor yang mengalami kesulitan keuangan (collapse) didasarkan atas hubungan keperdataan. Namun dalam perkembanganannya, bila ada indikasi mereka tak mau membayar atau sengaja mengemplang utang, maka masalah keperdataan ini bisa beralih ke pidana, sebagaimana disinggung Mahfud. Pemerintah seperti yang juga menggerak bahwa data para obligor BLBI ini sudah di tangan pemerintah, sehingga mereka tidak bisa kabur atau lari ke mana-mana. Benarkah ? Kiranya sudah cukup contoh, janganakan kabur ke luar negeri, masih di dalam negeri saja aparat kesulitan menangkap. Walaupun pemerintah menggunakan mekanisme penyelesaian secara pidana, sebagaimana disampaikan Mahfud MD, belum tentu juga masalah selesai. Misalnya, para pengemplang utang itu tidak kabur ke luar negeri dan menjalani proses hukum di Indonesia, tak serta merta persoalan selesai. Bagaimana seandainya mereka telah memindahkan uang maupun aset ke luar negeri ? Atau, bagaimana bila ternyata mereka telah mencuci uangnya (money laundering) ? Inilah yang harus diantisipasi, jangan sampai orangnya dihukum, tapi asetnya tak bisa disita. □

**KEPUTUSAN** Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tetap melarang Indosiar menayangkan sinetron ‘Suara Hati Istri: Zahra’ (2021) sudah tepat. Meskipun keputusan itu juga dibuat setelah mende-ngarkan tututan dari Jaringan Anak dan Kaum Muda Melawan Perkawinan Anak (JAKMMPA). Awalnya, pihak rumah produksi melalui Indosiar setuju untuk mengganti pemeran Zahra yang masih berusia 15 tahun. Namun demikian, pihak JAKMMPA tidak ingin memtolerir dengan bahwa sinetron ini seperti mengkampanyekan pernikahan dini dan penerimaan terhadap perilaku pedofilia. Fakta dalam peristiwa tersebut, baik keputusan KPI, JAKMMPA serta Indosiar pada dasarnya memiliki argumen masing-masing yang bisa dianalisis kebenarannya. Pertama, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) benar pada konteks melihat posisi kepentingan KPI sendiri yang didesak masyarakat. Dalam hal ini, kebenaran KPI adalah mau mende-ngar tuntutan masyarakat. Meskipun pada sisi lain, KPI juga bisa dinilai abai atau tidak kritis terhadap tayangan sinetron yang tengah ditayangkan. Pertanyaan untuk KPI adalah apakah jika tidak ada protes dari masyarakat akan tetap merestui sinetron tersebut? **Cukup Kompromis** Kedua, sikap Indosiar juga sudah cukup kompromis dengan mengganti pemeran Zahra dalam sinetron ‘Suara Hati Istri: Zahra’ dan kemudian menghentikan. Pada dasarnya, sinetron ini bercerita tentang kawin paksa yang melibatkan anak di bawah umur untuk menjadi bagian dari seorang pria kaya yang berpoligami. Karakter Zahra diperankan Lea Ciarachel (15). Sebagai sebuah cerita, tentu saja sinetron ini bukan hal yang luar biasa. Dalam sastra kita pernah mengenal novel ‘Lolita’ karya Vladimir Nabokov (1955) yang juga telah diterjemahkan dalam Bahasa

**Ulyati Retno Sari** Indonesia oleh Penerbit Serambi. Novel ini menceritakan pedofilia bernama Humbert yang membawa kabur Lolita gadis berusia 12 tahun. Novel berbasis psikologi ini juga pernah mendapat penolakan di Amerika Serikat dan negara lain karena dinilai tak bermoral. Hanya saja, novel ini kemudian mampu membuktikan sebagai salah satu karya sastra yang terbaik yang pernah ditulis di dunia. Namun, produksi sinetron yang melodramatis tentu sangat berbeda mutu dan kualitasnya dengan karya sastra tersebut. Sebuah sinetron yang diproduksi secara cepat saji pasti akan kehilangan banyak kualitas yang diinginkan, meskipun cerita ini sebenarnya pesan baik bahwa kekayaan dan kekuasaan seringkali merusak mental seseorang. Di samping (mungkin saja) cerita ini ingin mengkritik realitas masyarakat yang masih mengalhalkan segala cara untuk kehidupan poligami yang berdasarkan hawa nafsu.



**Memengaruhi** Ketiga, tuntutan JAKMMPA mewakili masyarakat netizen yang mengecam sinetron ‘Suara Hati Istri: Zahra’ sebagai tontonan yang tak mendidik ada benarnya. Sinetron, seperti pula film maupun sastra, adalah media yang mampu memengaruhi perilaku penontonnya menjadi seperti apa yang mereka tonton. Hal itu bisa kita temukan keterangannya dalam *Fundamentals of Media Effects* (2002) karya Jennings Bryant dan Susan Thompson sebagai efek priming. Priming, pertama adalah situasi di mana seseorang membaca atau menonton cerita sehingga mengaktifkan kenangan masa lampau. Kedua, priming juga berarti perilaku meniru seperti apa yang mereka baca atau tonton, sinetron, misalnya. Jadi, kekawatiran ini menjadi sangat ber-alasan. Setelah memperhatikan tiga analisis dari situasi argumen masing-masing pihak tersebut, bisa disimpulkan, justru saatnya kita mengevaluasi peran KPI sebagai lembaga pengawas penyiaran di Indonesia. Sinetron sudah seharusnya disensor naskahnya sebelum diputuskan layak tayang. Hal ini penting agar KPI tidak terlambat dalam membuat keputusan. □ **\*) Ulyati Retno Sari, Dosen Prodi Sastra Inggris, FADIB UIN Sunan Kalijaga, sedang menempuh Program Doktorat Ilmu Pendidikan Bahasa UNY dan aktif pada Divisi SosBud, PW Fatayat NU DIY**

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Memahami Budaya Laut Yogya

**SETIAP** tanggal 8 Juni diperingati sebagai Hari Laut Sedunia. Gagasan tentang peringatan itu pertama kali diajukan pada 1992 oleh Kanada di Earth Summit di Rio de Jenerio, Brasil. Sejak 2003 peringatan tahunan di level global digerakkan The Ocean Project bersama ribuan organisasi kelautan lainnya. Pada 2008 PBB mensahkannya sebagai peringatan resmi sedunia. Peringatan ini relevan bagi Yogya yang mempunyai visi pembangunan ‘Abad Samudera Hindia’. Hari Laut Sedunia adalah hari peringatan untuk menghargai laut-laut di dunia dan segala berkah yang diberikan bagi segenap penduduk bumi. Umat manusia merespons laut dengan mengembangkan kebudayaannya. Adapun kebudayaan mencakup sistem gagasan, sistem tindakan atau perilaku, dan benda-benda materi karya manusia atau budaya materi (Koentjaraningrat, 1985). Perspektif antropologis itu menjawab pertanyaan, apakah masyarakat Yogya juga memiliki budaya laut? Jawabannya adalah “ya” karena masyarakat Yogya telah merespon anugerah samudera itu dan bahkan kini bertekad menjadikannya sebagai fokus kebudayaan (*cultural focus*). **Gagasan** Pertama, masyarakat Yogya mempunyai sistem gagasan berupa nilai-nilai, filosofi, sistem keyakinan, pemikiran-pemikiran, sistem pengetahuan, dan berbagai gagasan tentang manusia dan laut. Kita tidak bisa memandang sebelah mata mitologi tentang magisnya Laut Selatan misalnya, sebab di balik narasi-narasi itu sejatinya terkandung pesan nilai dan filosofi yang mendalam. Orang Yogya bahkan membangun konsep kepemimpinan manusia mulia (*wong agung*) berdasar ilham laut. Hal itu terlihat dari pesan di balik kain batik bermotif ‘parang’ yang mengilustrasikan

**Haryadi Baskoro** kerasnya kehidupan ibarat ganasnya ombak yang bergulung-gulung dan manusia harus mampu menguasai dan mengatasinya (Kusrianto, 2013). Artinya, sistem gagasan orang Yogya tentang laut sudah berkembang. Para nelayan tradisional Yogya punya sistem pengetahuan tradisional *pranata mangsa* untuk mendeteksi musim. Eksisnya para nelayan di Yogya yang jumlahnya ribuan membuktikan bahwa kita punya ‘kecerdasan natural’ untuk menaklukkan ganasnya laut. Tentu yang perlu dikembangkan, jika kita memang mau mengembangkan peradaban samudera, adalah memajukan sistem pengetahuan modern (iptek) untuk memajukan budaya laut Yogya. Kedua, orang Yogya sudah mempunyai sistem perilaku budaya laut. Para nelayan kita bukan hanya berjiwa *entrepreneur* tetapi bahkan punya kecerdasan adversiti karena harus mencari nafkah dengan menghadapi ganasnya Laut Selatan. Anggapan bahwa Yogya itu hanya punya budaya darat dan lemah dalam budaya laut adalah mitos. Ruji-manto yang kini menjabat Ketua HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Cabang Gunungkidul adalah salah satu buktinya. Nenek moyangnya adalah petani, tetapi ia sukses menjadi nelayan (sumber YouTube: ‘Nelayan Tangguh Taklukkan Ganasnya Laut Selatan – Jogja Cerdas’). **Mengonsumsi Ikan** Memang yang perlu diperbaiki adalah perilaku masyarakat Yogya yang hidup dan pekerjaannya tidak dari laut. Perilaku mengonsumsi ikan misalnya, harus ditingkatkan. Sementara masih ada orang Yogya yang men-

cari nafkah dengan merusak alam sehingga kelestarian pantai terancam seperti yang terjadi di beberapa kawasan pesisir di Yogya. Ketiga, meskipun budaya laut sudah berkembang, dimensi budaya materi (benda-benda hasil karya manusia) masih harus dimajukan. Teknologi sederhana seperti rumpon ikan yang dipasang di laut lepas misalnya, itu pun kita masih sangat kurang. Kekayaan laut Yogya justru banyak dipanen nelayan-nelayan dari luar Yogya. Ganasnya Laut Selatan Yogya mutlak harus dihadapi dengan pengembangan teknologi modern seperti dermaga, pelabuhan, dan konstruksi penahan gelombang laut yang canggih. Semoga penyelesaian pembangunan Pelabuhan Laut Tanjung Adikarto di Kulonprogo yang sempat lama mangkrak menjadi terobosan besar pengembangan budaya laut Yogya. □ **\*) Dr Haryadi Baskoro, pakar Keistimewaan Yogya**

Pojok KR

Langgar pedoman perilaku penyiaran, KPI hentikan sinetron ‘Zahra’.  
-- **Padahal banyak sinetron sejenis masih tayang.**  
\*\*\*  
Pulihkan ekonomi DIY, vaksinasi jadi ‘game changer’.  
-- **Asalkan masyarakat taat prokes.**  
\*\*\*  
Muhammadiyah himpun Rp 32 miliar untuk Palestina.  
--**Kontribusi wujudkan perdamaian dunia.**

*Berabe*

**PIKIRAN PEMBACA**  
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik  
Naskah dikirim Email atau WA  
@ **pikiranpembaca@gmail.com** **0895-6394-11000**  
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Belajar Sejarah Melalui Museum

**JUMAT**, 4 Juni 2021 Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui program Wajib Kunjungan Museum (WKM) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), masyarakat Pedukuhan Pondok, Selomartani, Kalasan Sleman melaksanakan kunjungan di Museum Gunung Merapi, dan Museum Ullen Sentalu dengan jumlah 36 peserta. Berangkat dari Dusun Pondok, pukul 08.30 sampai 14.00, diantar dengan 3 armada dan 3 orang pemandu dari Dinas Kebudayaan DIY. Program WKM AKB sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengenal sejarah. WKM AKB membuat masyarakat lebih mengenal museum yang ada di Yogyakarta. Oleh karena itu diharapkan pengetahuan sejarah lebih meningkat, memberikan suatu kenangan yang menyenangkan pada masyarakat. Menurut Pratoyo Ilyas Eko Fitri Antoro selaku kepala padukuhan perlu adanya kunjungan museum untuk masyarakat guna menambah pengetahuan tentang sejarah dan mengenalkan museum-museum yang ada di Yogyakarta pada

masyarakat. WKM AKB merupakan salah satu metode untuk memberikan pembelajaran secara langsung pada masyarakat. WKM AKB memberikan pengalaman langsung, dan bermakna bagi masyarakat serta akan memberikan satu kenangan yang tak terlupakan. Menurut pengamatan penulis, bahwa banyak di antara warga masyarakat kurang memahami sejarah dan kurang mengenal museum. Pengenalan sejarah pada masyarakat melalui WKM AKB yang diterapkan pada usia 18 sampai 55 tahun dalam memahami lebih santai menyenangkan, namun tetap memberikan hasil yang maksimal dan memuaskan. Intinya program WKM Dinas Kebudayaan DIY sangat diperlukan sekali bagi masyarakat untuk lebih mengenal museum, dan sangat tepat digunakan sebagai tempat menambah pengetahuan sejarah yang menyenangkan dan mengasikan. □ **\*) Fransiska Purwanti SPd, Pondok, Selomartani, Kalasan, Sleman.**

**Kedaulatan Rakyat**  
SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.  
**Penerbit:** PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.  
**Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).  
**Penerbit:** Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi ( 2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.  
**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan  
**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.  
**Perwakilan dan Biro:**  
**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.  
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.  
**Semarang :** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.  
**Banyumas :** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Semarang, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.  
**Klaten :** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.  
**Magelang :** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.  
**Kulonprogo :** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.  
**Gunungkidul :** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.